

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional, pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian yang terpenting. Negara-negara yang masih berkembang atau sudah maju membutuhkan pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi dikelompokkan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan pula banyaknya angkatan kerja yang artinya akan meningkatkan penawaran terhadap tenaga kerja mendorong Indonesia untuk terus melakukan pembangunan ekonomi. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat dan mencapai kemakmuran. Namun, posisi Indonesia yang merupakan negara dengan banyak pulau dan jumlah penduduk yang sangat banyak menjadi faktor sulitnya melakukan pemerataan pembangunan ekonomi. Semakin tingginya penawaran kerja yang tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi juga tentunya akan menghambat pembangunan ekonomi, yang mana tenaga kerja merupakan faktor yang mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya sekedar terbatasnya peluang atau lapangan pekerjaan dan rendahnya produktivitas. Peningkatan angka pengangguran disebabkan oleh terbatasnya permintaan kerja, yang selanjutnya dikaitkan dengan faktor-faktor eksternal lain diantara yaitu menurunnya kondisi neraca pembayaran, meningkatnya utang luar negeri dan kebijakan-kebijakan lain yang mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat upah, investasi, dan menurunnya lapangan pekerjaan.

Pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh negara di dunia termasuk Indonesia menyebabkan penurunan berbagai sektor, salah satu yang paling besar ialah sektor perekonomian. Menurut data BPS Tahun 2020 Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07 persen. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi *Covid-19*.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan pertumbuhan *Covid-19* justru menyebabkan berkurangnya jumlah konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga konsumsi, yang mana kedua hal tersebut sangat berpengaruh pada Produk Domestik Bruto (PDB). Selain penurunan konsumsi, investasi juga mengalami penurunan dari 3,25 persen menjadi 1,94 persen. Penurunan ini mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Penurunan investasi lebih besar atas akibat pengaruh dari berkurangnya lapangan kerja dan meningkatnya jumlah pengangguran. Aktivitas perdagangan yaitu ekspor dan impor dengan pihak luar negeri juga mengalami penurunan dari -0,87 persen menjadi -7,70 persen pada ekspor dan -7,69 persen menjadi -17,71 persen pada impor. Walaupun ekspor dan impor mengalami penurunan yang cukup drastis mempengaruhi nilai dari ekspor neto pada saat kontraksi perekonomian.

Akibat *Covid-19* Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkatan kerja di Indonesia pada Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang, naik 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,24 persen poin. Peningkatan angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja di dalam pasar bertambah, namun penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak selalu diiringi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan nilai lebih bagi pembangunan manusia di suatu daerah. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menaikkan output daerah, diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja yang kemudian akan berdampak pula pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Penyerapan tenaga kerja yang meningkat jika diiringi dengan perbaikan nasib pekerja akan ikut meningkatkan hasil pembangunan ekonomi. Dalam kondisi tertentu upaya perbaikan nasib tenaga kerja tidak selalu berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, terkadang upaya tersebut justru menurunkan penyerapan tenaga kerja.

Dalam pembangunan ekonomi daerah pengelolaan daerah harus sesuai dengan potensi daerah yang mana sektor ekonomi menjadi prioritas masing-masing daerah dengan tujuan sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal. Pertumbuhan ekonomi daerah ialah tolak ukur apakah di daerah tersebut terdapat pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi proses produksi barang dan jasa. Secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif yang dapat diukur dari meningkatnya hasil produksi dan pendapatan.

Dalam skala regional untuk menentukan tingkat kemakmuran suatu daerah dapat diukur melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Suatu masyarakat dapat dikatakan makmur ketika masyarakat tersebut memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Perencanaan pembangunan daerah bersifat otonomi yang artinya setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Tujuan utama dari pemberian otonomi daerah ini ialah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Penerapan otonomi daerah dianggap kurang efektif ketika daerah tersebut tidak siap untuk mengelola potensi yang ia miliki. Ketidakmerataan sumber daya menyebabkan pembangunan daerah tidak merata.

Investasi merupakan unsur yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi yang masuk ke suatu daerah akan menambah modal untuk kegiatan

perekonomian. Penambahan modal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, apabila investasi terus masuk ke daerah dan disertai dengan ekonomi yang berdaya saing tinggi dalam jangka panjang akan meningkatkan penawaran melalui stok modal. Peningkatan stok kapital ini berdampak meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi untuk menambah aktivitas perekonomian daerah, yang artinya jika semakin tinggi akumulasi modal maka akan semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1. 1 Realisasi Investasi PMA Dan PMDN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (Nilai Investasi US\$)**

| Kota               | Tahun               |                     |                    |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                    | 2018                | 2019                | 2020               | 2021                | 2022                |
| Kep. Seribu        | 0                   | 0                   | 33.395,9           | 45.000,0            | 2.119,4             |
| Jakarta Selatan    | 9,931,086,3         | 15.302.265,4        | 10.505.462         | 15.476.692,6        | 33.502.121,2        |
| Jakarta Timur      | 7,887,210,6         | 3.157.692,6         | 2.597.67,8         | 4.360.535,7         | 15.902.685,9        |
| Jakarta Pusat      | 26,186,280,8        | 35.400.587,7        | 22.968.502,3       | 26.651.829          | 19.478.971,4        |
| Jakarta Barat      | 3.662.371,3         | 9.683.627,1         | 5.080.214,9        | 4.737.623,7         | 7.399.401,3         |
| Jakarta Utara      | 6,288,204,5         | 2.385.740,6         | 5.382.752,5        | 6.767.115,7         | 16.682.359,6        |
| <b>DKI Jakarta</b> | <b>53,955,153,5</b> | <b>66.217.837,7</b> | <b>46.56.006,4</b> | <b>58.038.796,7</b> | <b>92.967.658,8</b> |

Sumber: NSWI BKPM, 2023 (diolah penulis)

Untuk mengatasi permintaan dan penawaran tenaga kerja ialah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional adalah perluasan kesempatan kerja yang melalui perbaikan sektor perekonomian dan peningkatan upah minimum. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia akan diikuti dengan bertambahnya angkatan kerja. Menurut Novita (2007) hasil penelitian *Interational Labor Organization* (ILO) di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, mengakibatkan pengangguran yang semakin meningkat dan taraf hidup yang semakin rendah.

Masalah mengenai ketenagakerjaan di Indonesia berkaitan erat dengan sistem pemberian upah. Sistem pengupahan diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Upah minimum merupakan penerimaan bulanan terendah (minimum) yang didapatkan oleh seorang tenaga kerja sebagai imbalan suatu

pekerjaan yang dinilai dalam bentuk uang dan telah disepekat berdasarkan peraturan undang-undang. Dalam hal ini upah minimum terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Penerapan Upah minimum daerah harus disesuaikan dengan kebijakan upah minimum daerah untuk sektor formal. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat upah minimum yang ditetapkan oleh daerah harus dibayarkan agar terciptanya pemerataan distribusi pendapatan, yang kemudian tingkat upah tersebut akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan terkait upah minimum merupakan isu yang penting dari masalah ketenagakerjaan. Setiap tahunnya banyak serikat pekerja yang menuntut kenaikan upah kepada pemerintah. Namun, peningkatan upah yang diminta oleh pekerja ini tidak disertai dengan peningkatan produktivitas pekerjaannya. Banyak asumsi yang menyatakan bahwa perusahaan tidak sanggup untuk menuruti permintaan tersebut sehingga menutup usahanya atau memindahkan keluar negeri yang akibatnya akan meningkatkan pengangguran.

**Tabel 1. 2 Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

| Tahun | Upah Minimum Provinsi |
|-------|-----------------------|
| 2018  | 3.648.035             |
| 2019  | 3.940.973             |
| 2020  | 4.267.349             |
| 2021  | 4.416.187             |
| 2022  | 4.573.845             |

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi terbesar dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa sektor unggulan yang menjadi pemasukan daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terdapat 4,87 juta warga DKI Jakarta yang berstatus penduduk bekerja pada Agustus 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 59,96% berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Selain berkerja sebagai pegawai 24,27% penduduk bekerja DKI Jakarta melakukan usaha sendiri atau wirausaha, dan Mayoritas atau 24,16% penduduk bekerja DKI Jakarta berada di sektor perdagangan.

Menurut Nur and Rakhman (2019) sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan nilai PDRB DKI Jakarta tertinggi dengan sektor basis ekonomi diantaranya pada sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menghasilkan nilai PDRB tinggi pada unsur pertumbuhan nasional sebesar Rp77.601,1 miliar. Sektor Informasi dan Komunikasi juga termasuk menghasilkan nilai PDRB tinggi pada unsur bauran industri sebesar Rp 46.502,4 miliar. Selanjutnya, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi selain menghasilkan nilai PDRB tinggi pada unsur bauran industri sebesar Rp. 25.228,8 miliar dan pertumbuhan total PDRB sebesar Rp. 68.943,4 miliar.

Pertumbuhan ekonomi daerah cenderung membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dengan pengelompokan daerah menurut struktur pertumbuhan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta untuk periode tahun 2018-2022. Berikut ini data pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2018-2022:

**Tabel 1. 3 Perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 Dasar Harga Konstan Berdasarkan Kota/Kabupaten (Milyar rupiah)**

| Kabupaten/Kota     | Tahun               |                     |                     |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                |
| Kepulauan Seribu   | 3.936,01            | 3.898,74            | 3.706,25            | 3.648,88            | 3.591,86            |
| Jakarta Selatan    | 394.429,96          | 421.300,85          | 419.257,19          | 429.277,95          | 451.765,49          |
| Jakarta Timur      | 298.530,65          | 313.550,67          | 299.515,16          | 313.816,53          | 329.680,72          |
| Jakarta Pusat      | 424.204,37          | 452.521,54          | 449.518,14          | 460.024,27          | 482.088,23          |
| Jakarta Barat      | 299.452,40          | 318.927,93          | 316.172,61          | 327.613,14          | 345.685,84          |
| Jakarta Utara      | 320.658,35          | 332.747,11          | 312.100,58          | 330.883,87          | 350.232,86          |
| <b>DKI Jakarta</b> | <b>1.735.208,29</b> | <b>1.836.240,55</b> | <b>1.792.291,09</b> | <b>1.856.075,82</b> | <b>1.953.455,85</b> |

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023 (diolah oleh penulis)

Jakarta Pusat menjadi kota administrasi di Ibu Kota dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar pada 2022. Nilai PDRB Jakarta Pusat mencapai Rp482 milyar. Nilai itu meningkat cukup jauh dari 2021 yang mencapai Rp460 milyar. Secara umum, perolehan PDRB DKI Jakarta mencapai Rp1.953,455 milyar pada 2022. Perolehan itu naik dari sebelumnya yang sebesar Rp1.856,075

milyar pada 2021. PDRB ini atas dasar harga konstan (ADHK), digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas, dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 yaitu tercatat sebesar Rp1.836.240,55 Milyar menurut harga konstan. Secara riil dari data tersebut pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 relatif lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar Rp1.735.208,29 milyar menurut harga konstan. Namun akibat Covid-19 yang melanda di Indonesia pada tahun 2020 menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp1.792.291,09 Milyar. Dapat dilihat pula keadaan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2018-2019 relatif mengalami kenaikan walaupun di tahun 2020 sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan akibat dari Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Pemerintah terus berusaha untuk memperbaiki sektor perekonomian walaupun Pandemi Covid-19 masih terus terjadi, hal tersebut di buktikan dengan meningkatnya PDRB pada tahun 2022 sebesar Rp1.856.075,82. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun.

**Tabel 1. 4 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Kota Tahun 2018-2022 (Jiwa)**

| Kabupaten/Kota                                 | Tahun            |                  |                  |                  |                  | Jumlah    |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |           |
| Kepulauan Seribu                               | 9 408            | 9 077            | 9 985            | 10 811           | 11 381           | 50 662    |
| Jakarta Selatan                                | 1 050 756        | 1 020 437        | 1 011 605        | 1 020 587        | 1 075 250        | 5 178 635 |
| Jakarta Timur                                  | 1 249 412        | 1 330 671        | 1 257 752        | 1 257 540        | 1 271 123        | 6 366 498 |
| Jakarta Pusat                                  | 432 460          | 431 484          | 409 589          | 422 188          | 434 918          | 884 533   |
| Jakarta Barat                                  | 1 142 915        | 1 177 100        | 1 148 244        | 1 181 095        | 1 232 966        | 5 882 320 |
| Jakarta Utara                                  | 841 828          | 868 208          | 822 076          | 845 194          | 849 464          | 4 226 770 |
| <b>DKI Jakarta dan<br/>Pertumbuhan<br/>(%)</b> | <b>4 726 779</b> | <b>4 836 977</b> | <b>4 659 251</b> | <b>4 737 415</b> | <b>4 875 102</b> | -         |
|  | -                | 2.28%            | -3.81%           | 1.65%            | 2.82%            | -         |
| <b>Jumlah<br/>Angkatan Kerja</b>               | <b>5 041 620</b> | <b>5 157 878</b> | <b>5 232 031</b> | <b>5 177 314</b> | <b>5 252 396</b> | -         |
| <b>Angkatan Kerja<br/>Terserap</b>             | <b>93.76%</b>    | <b>93.78%</b>    | <b>89.05%</b>    | <b>91.50%</b>    | <b>92.82%</b>    | -         |

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023 (diolah oleh penulis)

Berdasarkan data ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta pada Tabel 1.4 Jumlah angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kota mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jumlah angkatan kerja yang berfluktuasi menjadi masalah yang cukup besar karena tidak semua angkatan kerja dapat memasuki dunia kerja karena terbatasnya lapangan pekerjaan.

Jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya tanpa di barengi dengan meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan menjadikan penyerapan tenaga di Provinsi DKI Jakarta harus diperhatikan, karena pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan erat dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup mengimbangi jumlah pencari kerja yang akan memasuki pasar kerja. Dalam mengurangi jumlah pengangguran dapat diupayakan dengan meningkatkan kinerja sektor-sektor unggulan suatu daerah.

Terkait hal-hal yang terjadi diatas, penulis tertarik untuk mengamati fenomena tersebut lebih dalam. Oleh sebab itu, penulis mengangkat fenomena tersebut menjadi suatu penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi (UMP), Investasi, dan *Dummy* Covid-19 Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022”**

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas dan untuk memperjelas arah penelitian serta batasa penelitian maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Petumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaimana Pengaruh Investasi terhadap penyerapan tenaga kerj di Provinsi DKI Jakarta?

4. Bagaimana pengaruh *dummy* Covid-19 terhadap penyerapan tenaga kerja?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi/kota terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022
3. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022
4. Untuk mengetahui pengaruh *dummy* Covid-19 terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu

1. Bagi Pemerintah

Sebagai saran dan masukan bagi Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merancang kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi, upah minimum, investasi dan penyerapan tenaga kerja.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pertumbuhan ekonomi, upah minimum, investasi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta.

3. Bagi Peneliti

Sebagai wawasan, pengalaman, dan edukasi tambahan dalam melakukan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi, upah minimum, investasi, *dummy* Covid-19 dan penyerapan tenaga kerja.